

Studi komparatif kinerja keuangan daerah Kota Jambi dan Provinsi Jambi

Faradilla Herlin*¹; M. Syurya Hidayat²

¹Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Jambi

²Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Universitas Jambi

*E-mail korespodensi: faradilla.surya@gmail.com

Abstract

The analysis carried out aims to perform a comparative analysis of the regional financial performance of Jambi City and Jambi Province. The analytical method used is the secondary data comparative analysis method. The analytical model used is an indicator of fiscal dependence, income generation capacity, an indicator of the proportion of capital expenditures, and an indicator of the contribution of the government sector. The analysis results conclude that overall, the regional financial performance of Jambi City is better than Jambi Province.

Keywords : *Fiscal dependence, Income generation capacity, The proportion of capital expenditures, Contribution of the government sector*

Abstrak

Analisis yang dilakukan bertujuan untuk melakukan analisis komparatif terhadap kinerja keuangan daerah Kota Jambi dan Provinsi Jambi. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis komparatif data sekunder. Model analisis yang digunakan adalah indikator ketergantungan fiskal, indikator kapasitas pembangkitan pendapatan, indikator proporsi belanja modal dan indikator kontribusi sektor pemerintah. Hasil analisis menyimpulkan bahwa secara keseluruhan kinerja keuangan daerah Kota Jambi lebih baik dari Provinsi Jambi

Kata kunci: Ketergantungan fiskal, Kapasitas menghasilkan pendapatan, Proporsi belanja modal, Kontribusi sektor pemerintah

PENDAHULUAN

Dilihat dari sisi anggaran, pemerintah daerah menggunakan anggaran sebagai instrumen kebijakan dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan daerah. Hal ini terlihat dari perumusan kebijakan di dalam anggaran yang dibagi berdasarkan proporsi sektor ekonomi. Arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah akan terlihat pada sector ekonomi yang memiliki proporsi terbesar dalam anggaran (Bacarreza,dkk.2019). Ini berarti, ketersediaan anggaran menjadi hal yang sangat urgen dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah harus memiliki strategi tersendiri dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya.

Upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah diakui bukanlah suatu hal yang mudah secara operasional. Terbatasnya infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya piranti hukum dan peraturan, serta keterampilan dan profesionalisme petugas yang masih timpang, merupakan beberapa hal yang menjadi kendala peningkatan kemampuan dan kinerja keuangan daerah (Blochliger,2018). Kendala yang dihadapi relatif bertambah seiring dengan terjadinya perubahan dalam sistim pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun

2005 dan Undang-undang 32 tahun 2005 yang berimplikasi pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Dengan perubahan sistem, secara langsung juga berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan di daerah. Pendekatan yang selama ini menggunakan pendekatan proyek, selaras dengan paradigma baru dirubah dengan menggunakan pendekatan sistem Anggaran Berbasis Kinerja(ABK). Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut membawa konsekuensi pada kinerja keuangan daerah, termasuk kinerja keuangan daerah yang akan sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh oleh daerah itu sendiri, baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun atas upaya penggalian pendapatan asli daerah itu sendiri.

Kinerja keuangan daerah merupakan suatu hal yang sangat penting dikarenakan terkait secara langsung dengan pencapaian tujuan pembangunan (Bartolini,2016). Semakin baik kinerja keuangan suatu daerah maka akan semakin berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Ada empat indicator yang dapat mencerminkan kinerja keuangan suatu daerah yaitu indicator ketergantungan fiskal, indicator kapasitas penciptaan pendapatan, indicator proporsi belanja modal dan indicator kontribusi sector pemerintah.

Dikarenakan begitu pentingnya informasi mengenai kinerja keuangan suatu daerah maka perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Dalam tulisan ini akan dilakukan analisis komparasi antara kinerja keuangan Kota Jambi dengan kinerja keuangan Provinsi Jambi. Analisis komparasi dilakukan dikarenakan Kota Jambi merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang memperlihatkan kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan daerah lainnya. Sedangkan komparasi dilakukan terhadap Provinsi Jambi, dengan alasan sebagai daerah induk, yang lebih mencerminkan kinerja keuangan seluruh daerah di Provinsi Jambi.

METODE

Dalam penelitian ini akan digunakan metode analisis studi komparatif data sekunder. Yang dimaksud dengan analisis studi komparatif data sekunder adalah analisis perbandingan data antar dua objek yang dianalisis, dalam hal ini adalah kinerja keuangan Kota Jambi dengan kinerja keuangan Provinsi Jambi. Analisis data yang dilakukan dalam tulisan ini mengenai Kinerja keuangan daerah. Ada empat model analisis indicator kinerja keuangan daerah yang digunakan. Adapun empat model yang dimaksud adalah berikut ini:

Indikator ketergantungan fiskal (FID)

$$FID = 100 - \frac{(DAU - BP)}{TPD} \times 100\%$$

Dimana:

FID = Tingkat ketergantungan fiskal

DAU = Dana alokasi umum

BP = Belanja pegawai

TPD = Total pendapatan daerah

Kapasitas penciptaan pendapatan (FGI)

$$FGI = \frac{PAD}{PDRB} \times 100\%$$

Dimana :

FGI = Kapasitas penciptaan pendapatan

PAD = Pendapatan asli daerah

PDRB = Produk domestik regional bruto

Proporsi belanja modal (FCAPEX)

$$FCAPEX = \frac{BM}{TBD} \times 100\%$$

Dimana :

FCAPEX= Proporsi belanja modal

BM = Belanja modal

TBD = Total Belanja Daerah

Kontribusi sektor pemerintah (FCE)

$$FCE = \frac{TBD}{PDRB} \times 100\%$$

Dimana :

FCE = Kontribusi sektor pemerintah

TBD = Total belanja daerah

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

Berdasarkan empat rumus diatas maka dapat dilakukan perhitungan Indeks Kinerja Keuangan Daerah (IKKD) sebagai berikut (Bappenas-UNDP, 2007) :

$$IKKD_{i,1} = \frac{((100-FID_{i,1}) + FGI_{i,1} + FCAPEX_{i,1} + FCE_{i,1})}{4}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara substansi, ketergantungan fiskal adalah perbandingan antara Dana Alokasi Umum (yang sudah dikurangi oleh Belanja Pegawai) dengan Total Pendapatan didalam anggaran daerah bersangkutan, dihitung dalam satuan persen per tahun. Ini berarti, semakin kecil nilai yang dihasilkan maka mencerminkan semakin rendah tingkat ketergantungan dari daerah dimaksud.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan maka diketahui bahwa tingkat ketergantungan fiskal Kota Jambi jauh lebih rendah dibandingkan Provinsi Jambi. Ini berarti, Provinsi Jambi memiliki ketergantungan anggaran terhadap pemerintah pusat lebih besar didalam pendanaan APBD nya. Ini juga mencerminkan cukup besarnya kemampuan Kota Jambi dalam pembiayaan pembangunan. Namun demikian, setelah tahun 2017 tingkat ketergantungan fiskal Kota Jambi cukup besar.

Rendahnya nilai ketergantungan *fiscal* juga mencerminkan kemampuan pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan pendapatan daerahnya, terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Inilah yang sebenarnya makna dari otonomi daerah, yaitu kemampuan daerah dalam mengelola anggarannya dalam merealisasikan rencana pembangunannya. Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1. Perkembangan tingkat ketergantungan fiskal Kota Jambi dan Provinsi Jambi, Tahun 2015-2019.

Wilayah	Tingkat ketergantungan fiskal				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Jambi	1.11%	0.37%	7.04%	26.96%	58.97%
Provinsi Jambi	12.94%	22.48%	6.27%	18.60%	32.33%

Sumber : Data diolah, 2020

Kinerja keuangan daerah berikutnya dapat dilihat dari Kapasitas Penciptaan Pendapatan. Adapun yang dimaksud dengan Kapasitas Penciptaan Pendapatan adalah Proporsi PAD terhadap nilai PDRB daerah bersangkutan, dihitung dalam satuan persen per tahun. Rasio ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilainya berarti semakin besar kemampuan PAD dalam menghasilkan pendapatan daerah, yang tercermin pada nilai PDRB.

Berdasarkan hasil perhitungan maka diketahui bahwa nilai Kapasitas Penciptaan Pendapatan Kota Jambi lebih besar dibandingkan Provinsi Jambi. Ini berarti, kemampuan Pemerintah Kota Jambi dalam menghasilkan PAD mampu berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Lebih lanjut, hal ini juga mencerminkan bahwa PAD yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Jambi yang digunakan untuk membiayai proyek pembangunan, digunakan secara tepat dan memiliki dampak terhadap perekonomian daerah (G.Chirwa and Odhiambo,2016). Hal sebaliknya terjadi untuk Provinsi Jambi, dimana nilai Kapasitas Penciptaan Pendapatannya rata-rata dibawah satu.

Hasil perhitungan Kapasitas Penciptaan Pendapatan menjadi sangat menarik untuk dikomparasikan. Bukan hanya mencerminkan kemampuan Kota Jambi dalam menghasilkan PAD namun juga mencerminkan kemampuan dalam membuat perencanaan pembangunan dan merealisasikannya. Sehingga peningkatan penerimaan PAD yang digunakan kembali untuk membiayai proyek pembangunan, berdampak positif. Perbandingan nilai Kapasitas Penciptaan Pendapatan antara Kota Jambi dengan Provinsi Jambi dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2. Perkembangan kapasitas penciptaan pendapatan Kota Jambi dan Provinsi Jambi, Tahun 2015-2019.

Wilayah	Kapasitas penciptaan pendapatan (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Jambi	3.179	3.286	4.300	1.669	1.843
Provinsi Jambi	0.993	0.945	1.158	0.529	0.479

Sumber: Data diolah, 2020

Indikator kinerja keuangan daerah berikutnya adalah nilai proporsi belanja modal. Adapun yang dimaksud dengan proporsi belanja modal adalah Perbandingan antara jumlah belanja modal terhadap total belanja daerah kabupaten kota bersangkutan, dihitung dalam satuan persen per tahun. Indikator ini cukup penting dikarenakan mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangannya (Ganaie N.A.Khan,2018). Idealnya, substansi utama dari kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada suatu pemerintahan adalah adanya komitmen pemerintah untuk menggunakan anggaran sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini didalam APBD tercermin dari besaran proporsi belanja modal terhadap total belanja.

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap proporsi belanja modal maka terlihat proporsi yang cukup besar dialokasikan oleh pemerintah Kota Jambi untuk belanja modal. Tidak demikian halnya dengan Provinsi Jambi yang terus mengalami penurunan proporsi.

Informasi komparatif mengenai proporsi belanja modal antara Kota Jambi dengan Provinsi Jambi dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3. Perkembangan proporsi belanja modal Tahun 2015-2019.

Wilayah	Proporsi belanja modal				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Jambi	26.992	27.785	28.024	27.803	14.384
Provinsi Jambi	23.104	28.701	21.671	7.831	3.194

Sumber: Data diolah, 2020

Rasio kinerja keuangan daerah berikutnya yang dianalisis adalah kontribusi sector pemerintah. Rasio kontribusi sector pemerintah ini adalah kontribusi total belanja pemerintah di dalam nilai PDRB daerah yang bersangkutan, dihitung dalam satuan persen per tahun. Substansi dari rasio ini adalah ingin melihat peranan pemerintah, yang tercermin dari nilai belanja APBD nya, yang berdampak terhadap perekonomian daerah (tercermin pada nilai PDRB) (Kim,2019).

Hasil analisis menunjukkan bahwa peranan belanja daerah yang berperan sebagai stimulus fiskal dalam perekonomian Kota Jambi cukup significant. Hal ini dapat dilihat dari nilai kontribusi pemerintah yang cukup besar bila dibandingkan dengan Provinsi Jambi. Hal ini juga mencerminkan bahwa pemerintah benar benar bereperan dalam ikut menggerak perekonomian daerah (Korompot and Warongan,2017). Tentu saja peranan tersebut lebih mengarah sebagai pemicu atau trigger dalam bentuk penyediaan fasilitas dan infratraktur yang menunjang pergerakan perekonomian daerah. Informasi lebih jelas mengenai perbandingan antara kontribusi sector pemerintah Kota Jambi dengan Provinsi Jambi, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Perkembangan rasio kontribusi sektor pemerintah Kota Jambi dan Provinsi Jambi, Tahun 2015-2019.

Wilayah	Kontribusi Sektor Pemerintah (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Jambi	17.185	17.447	16.195	6.454	5.400
Provinsi Jambi	2.740	2.524	3.028	0.853	0.900

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan keempat indicator kinerja keuangan daerah yang telah dianalisis secara parsial pada bagian terdahulu maka pada bagian berikut akan dilakukan perhitungan secara akumulatif. Hasil perhitungan secara akumulatif memperlihatkan bahwa kinerja keuangan Kota Jambi lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan dengan kinerja keuangan Provinsi Jambi. Pada tahun 2015, kinerja keuangan Kota Jambi adalah sebesar 31,67 sedangkan Provinsi Jambi hanya sebesar 31, 67. Pada tahun 2017, rasio kinerja keuangan Kota Jambi meningkat mencapai 37,112 sedangkan kinerja keuangan Provinsi Jambi turun pada angka 31,448.

Tabel 5. Perkembangan indikator kinerja keuangan Kota Jambi dan Provinsi Jambi, Tahun 2015-2019.

Wilayah	Indikator keuangan daerah				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Jambi	36.836	37.128	37.112	33.914	30.259
Provinsi Jambi	31.677	32.986	31.448	27.257	26.062

Sumber: Data diolah, 2020

Penurunan rasio kinerja keuangan daerah terjadi pada tahun 2019. Walaupun mengalami penurunan, nyatanya rasio kinerja keuangan Kota Jambi tetap lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jambi. Adapaun rasio kinerja keuangan Kota Jambi adalah sebesar 30,259 sedangkan Provinsi Jambi dengan nilai yang lebih kecil yaitu sebesar 26,062. Informasi lebih detail dapat dilihat pada Tabel 5.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bagian terdahulu maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1).Tingkat ketergantungan fiskal Kota Jambi menunjukkan trend yang meningkat dibandingkan Provinsi Jambi. 2).Kapasitas Penciptaan Pendapatan Kota Jambi lebih besar dibandingkan kemampuan Provinsi Jambi. 3).Kemampuan belanja modal dalam menggerak perekonomian Kota Jambi lebih besar dibandingkan Provinsi Jambi. 4).Kontribusi sector pemerintah melalui belanja dalam menggerak perekonomian Kota Jambi lebih besar dibandingkan Provinsi Jambi, 5).Secara keseluruhan, kinerja keuangan daerah Kota Jambi lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jambi.

Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan terdahulu maka dapat disaran hal sebagai berikut : 1).Perlu dilakukan optimalisasi penerimaan daerah, khususnya PAD dalam rangka mengurangi ketergantungan pemerintah Kota Jambi dan khususnya lagi bagi Provinsi Jambi, sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan daerah Provinsi Jambi. 2).Perlu dilakukan perencanaan yang tepat dan maksimalisasi anggaran belanja pada APBD yang berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga peningkatan kinerja keuangan daerah secara riil juga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bacarreza,Gustavo Canavire., Vazquez, Jorge Martinez., & Yedgenov, Bauyrzhan. (2019). Identifying and disentangling the impact of fiscal decentralization on economic growth, IDB working paper series N^o IDB-WP-1037
- Bartolini, David., Stossberg, Sibylle., & Blöchliger, Hansjörg. (2016). Fiscal decentralisation and regional disparities, OECD Economics Department Working Papers No. 1330, <https://dx.doi.org/10.1787/5jlpq7v3j237-en>
- Blöchliger,Hansjörg. (2018). Fiscal decentralisation and economic growth, <https://www.researchgate.net/publication/326354962,doi:10.1787/9789264302488-4-en>
- G.Chirwa,Themba., & Odhiambo,Nicholas M. (2016). Macroeconomic determinants of economic growth: a review of international literature, *South East European Journal of Economics and Business*, 11 (2) 2016, 33-47 doi: 10.1515/jeb-2016-0009
- Ganaie, Aadil Ahmad., Bhat, Sajad Ahmad., Kamaiah,Bandi, & N. A. Khan. (2018). Fiscal decentralization and economic growth: evidence from indian state, *South Asian Journal of Macroeconomics and Public Finance*, 7(1) 83–108, doi: 10.1177/2277978718760071, <http://journals.sagepub.com/home/smp>
- Kim, Junghun. (2019). Fiscal decentralisation and inclusive growth: An overview, OECD Fiscal Federalism Studies.
- Korompot, Riska and Warongan,Jessy. (2017). Analysis of financial, performance in the government of North Sulawesi, *Jurnal Accountability*, 6(2), 2017, 9 - 19